

**RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM  
Jl. Sengkawit Raya Komplek Pasar Induk Tanjung Selor  
Kode Pos 77212**



### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak luput dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.

Tanjung Selor, 27 Januari 2023  
Kepala Dinas

**Hj. Hasriyani, SH., MM**  
**Pembina TK. I, IV/b**  
**NIP. 19730717 200312 2 008**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	<b>14</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	67
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>81</b>
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	81
3.1.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.1.2 Telahaan terhadap Prioritas Provinsi.....	85
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	92
<b>BAB I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>93</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>116</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023.....	21
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara.....	51
Tabel 2.4	Usulan Program kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara.....	67
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mendukung Prioritas Nasional.....	81
Tabel 3.2	Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah.....	85
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	95



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Menurut pasal 273 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD, rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Sejalan dengan pengertian tersebut, dokumen Renja Disperindagkop dan UKM tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Disperindagkop dan UKM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok. Dokumen Renja 2024 menjadi acuan bagi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”** dan tema RKPD tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Keanekaragaman Industri Dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”** didalam Renja ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD 2024.



Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan melaksanakan Program yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah program rutin yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan didukung 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan antara lain Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi didukung dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan sub kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melaksanakan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didukung dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) melaksanakan sosialisasi permodalan dan bantuan usaha bagi UMKM di Provinsi Kalimantan Utara dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
5. Program Pengembangan UMKM melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan koperasi di Provinsi Kalimantan Utara dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dan sub kegiatan



Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan melaksanakan sosialisasi terkait Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) didukung dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA.
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melaksanakan kegiatan Sub Ongkos Angkut Barang ke daerah 3T dan melanjutkan pembangunan sarana perdagangan tahap kedua yang didukung oleh kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting melaksanakan pengawasan terkait stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pening di Kalimantan Utara dengan didukung kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor serta Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dengan sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
9. Program Pengembangan Ekspor melaksanakan pembinaan kepada para pelaku agar berorientasi ekspor dan melakukan promosi terhadap produk UMKM didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor



- Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional, Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan, Peningkatan Citra Produk Ekspor, Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen melaksanakan pengawasan barang dan jasa yang beredar serta operasional BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
  11. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melaksanakan kegiatan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi, Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
  12. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan RPIK dan pembangunan KIPI Tana Kuning di dukung dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
  13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri melaksanakan kegiatan pengawasan terkait perizinan industry besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan



Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi serta sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi.

14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melaksanakan pengawasan terkait penyediaan informasi industri pada aplikasi SIINas didukung dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);



- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- p. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - r. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
  - s. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);
  - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
  - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- ab. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- ac. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Renja Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2024.
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan tahun 2024.



- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024.
- d. Menjadi pedoman penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2024; dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

##### **Bab V Penutup**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2022 di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdapat target kinerja yang tidak tercapai, tercapai serta melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, dimana tidak terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target, terdapat 25 sub kegiatan mencapai target dan 1 sub kegiatan yang melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dan Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan.
- c. Program Pengembangan Ekspor, Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Dan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
- d. Program Pengembangan Ekspor, Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Dan Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional.
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan dengan sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- g. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan



Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

- h. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Dan Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
  - i. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
  - j. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri.
  - k. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Penyusunan, Penerapan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri.
  - l. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan UMKM, Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Dan Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :



- Untuk kinerja terpenuhi tetapi untuk serapan anggaran tidak terpenuhi dikarenakan juknis pelaksanaan kegiatan anggaran DAK Non Fisik Bidang Koperasi dan UKM yang keluar setelah penyusunan anggaran tahun 2022.
  
  - b. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja :
    - Tidak terjadi refocusing anggaran pada sub kegiatan
    - Manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik
    - Menjadikan indikator sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan
  
  - c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja :
    - Target capaian yang ditetapkan terlalu rendah sementara anggaran tersedia mampu mengakomodir target capaian yang direncanakan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja Persentasi UMKM yang mengakses KUR sebesar 54,67% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 45,46%. Implikasi yang ditimbulkan adalah dengan meningkatnya UMKM yang mengakses kredit perbankan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.
  - b. Program Pengembangan UMKM dengan target kinerja Persentase pertumbuhan UKM baru sebesar 3,5% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,93%. Implikasi yang ditimbulkan dengan meningkatnya pertumbuhan UKM dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.
  - c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun sebesar 25% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 25%. Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pencapaian kinerja ini adalah tersedianya sarana distribusi perdagangan di Provinsi Kalimantan



Utara yang berguna untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan bahan penting di Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan target kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu sebesar 6% dan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 8%. Impikasi yang disebabkan adalah terjaminnya stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting di Provinsi Kalimantan Utara.
- e. Program Pengembangan Ekspor dengan target kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara sebesar 16% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 62,50%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian kinerja ini adalah meningkatnya jenis komoditi ekspor di Provinsi Kalimantan Utara dan dapat menambah nilai ekspor di Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar sebesar 1% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1%. Implikasi yang ditimbulkan adalah dengan berkurangnya barang yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual maka akan memperbesar peredaran barang yang memenuhi syarat dan dapat melindungi hak konsumen.
- g. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kinerja target kinerja Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga sebesar 80% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 80%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian ini adalah dengan meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha akan meningkatkan tertib usaha di Provinsi Kalimantan Utara dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- h. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan target kinerja Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat sebesar 35% dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 35%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian ini adalah dengan meningkatnya industry kecil menengah yang sehat maka akan memperkuat



perekonomian dan dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  - a. Perlunya pembinaan, pembahasan dan sosialisasi baik dari sisi intern dinas untuk meningkatkan sistem kinerja dan tanggung jawab dalam merancang/merencanakan program.
  - b. Melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan mengevaluasi untuk dilakukan perbaikan di setiap kegiatan yang telah dan akan dilakukan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan lebih baik dan optimal dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, sehingga dapat menghasilkan sinkronisasi kegiatan dan data antara provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.

Hasil pelaksanaan evaluasi renja perangkat daerah tahun 2022 sebesar 90,66%. Pada saat renja ini disusun evaluasi renja 2023 belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran dan terdapat perubahan indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk renja tahun 2023 sehingga indikator tahun 2021, 2022 dan 2023 berbeda, hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

*Tabel 2.1*

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) sesuai Kepmendagri 050-5889	Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) (2022)	Realisasi PD Tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s / d tahun berjalan ( tahun n-1 ) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	3a	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>											
2.1 7.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100%
2.1 7.0 1.1. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	85 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	19 Dokumen	22%
2.17 .01. 1.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
2.17 .01. 1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	65 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	20%



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17 .01. 1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Doku men	2	Dokumen	20%
<b>2.1 7.0 1.1. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17 .01. 1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	564	Orang / Bulan	588	Orang/ Bulan	980%
2.17 .01. 1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218	Doku men	1242	Dokumen	2070%
<b>2.1 7.0 1.1. 05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17 .01. 1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	240	stel	0	stel	293	stel	285	stel	97%	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	285	-	119%
2.17 .01. 1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66	Orang	32	Orang	5	Orang	4	Orang	80%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	51	Orang	77%
<b>2.1 7.0 1.1. 06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17 .01. 1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	65	Unit	13	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Unit	20	Unit	31%
2.17 .01. 1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	25	Paket	42%



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17 .01. 1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	29	Paket	48%
2.17 .01. 1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9	Paket	33	Paket	55%
2.17 .01. 1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10800	Eksemplar	1440	Eksemplar	0	Eksemplar	0	Eksemplar	0%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500	Dokumen	3940	Dokumen	36%
2.17 .01. 1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710	Kali	130	Kali	210	Kali	210	Kali	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	470	Laporan	66%
<b>2.1 7.0 1.1. 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>63</b>	<b>Unit</b>	<b>17</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>0%</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>40</b>	<b>Unit</b>	<b>63%</b>
2.17 .01. 1.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	63	Unit	17	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	40	Unit	63%
<b>2.1 7.0 1.1. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17 .01. 1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	8200	pcs	1640	pcs	1640	pcs	1640	pcs	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	3282	Laporan	40%
2.17 .01. 1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	30	Laporan	50%
2.17	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa	60	Unit	15	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	Jumlah Laporan Penyediaan	2	Lapor	29	Laporan	48%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

.01. 1.08 .03	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	an			
<b>2.1 7.0 1.1. 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>60 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>60%</b>	
2.17 .01. 1.09 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	8 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0%	
2.17 .01. 1.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	100%					
2.17 .01. 1.09 .09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/ direhabilitasi	5 Ruang an	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100%					
<b>2.1 7.0 3</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>36,16 %</b>	<b>80 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>23,58 %</b>	<b>23,58 %</b>	<b>65%</b>	
<b>2.1 7.0 3.1. 01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Kegiatannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>76 %</b>	<b>17 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>64 %</b>	<b>81 %</b>	<b>107%</b>	
2.17 .03.	Meningkatkan Akuntabilitas,	Jumlah Koperasi yang dilakukan	250 Koperasi	17 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0%	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas,	27 Unit Usaha	44 Unit Usaha	18%	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

1.01 .01	Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan							Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat			
2.1 7.0 5	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	71 %	0 %	0 %	0 %	0%	<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	0 %	0 %	0%	
2.1 7.0 5.1. 01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	325 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0%	<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	0 Peserta	0 Peserta	0%	
2.17 .03. 1.01 .01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	325 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0%	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0 Orang	0%	
2.1 7.0 7	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	62,67 %	59,35 %	54,67 %	45,46 %	83%	<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	56,67 %	56,67 %	90%	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

2.1 7.0 7.1. 01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	290 UMKM	40 UMKM	58 UMKM	58 UMKM	100%	<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	58 UMKM	156 UMKM	54%
2.17 .07. 1.01 .01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	317 UMKM	70 UMKM	35 UMKM	35 UMKM	100%	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	58 Unit Usaha	163 Unit Usaha	51%
2.1 7.0 8	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	9,5 %	1,93 %	5,3 %	1,93 %	36%	<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	5 %	5 %	53%
2.1 7.0 8.1. 01	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	369 UMKM	15 UMKM	31 Unit Usaha	15 Unit Usaha	48%	<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	51 Pelaku Usaha	97 Pelaku Usaha	26%
2.17 .08. 1.01 .01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/ pendampingan Produksi dan	296 0 UMKM	519 UMKM	519 Unit Usaha	683 Unit Usaha	132%	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta	480 Unit usaha	1682 Unit usaha	57%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	manusia, serta Desain dan Teknologi	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi							Desain dan Teknologi Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan /pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi			
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>											
<b>3.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>											
<b>3.3</b>	<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>98 %</b>	<b>80 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>93 %</b>	<b>93 %</b>	<b>95%</b>	
<b>3.3</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>18.843 Form</b>	<b>2.328 Form</b>	<b>0 Form</b>	<b>0 Form</b>	<b>0%</b>	<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>2.916 Form</b>	<b>5244 Form</b>	<b>28%</b>	
3.30	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	90 Pelaku Usaha / UKM	60 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	0%	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	75 Dokumen	135 Dokumen	150%	
<b>3.3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25%</b>	
<b>3.3</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas</b>	<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>5 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>3 lokasi</b>	<b>60%</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30 .03. 1.01 .01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 lokasi	13 lokasi	28 lokasi	28 lokasi	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	3 Unit	100%
3.30 .03. 1.01 .01	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan	0 Laporan	0%
<b>3.3 0.0 4</b>	<b>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>8 %</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>	<b>100%</b>
<b>3.3 0.0 4.1. 01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>0 Jenis</b>	<b>0 Jenis</b>	<b>0%</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>24 Jenis</b>	<b>200%</b>
3.30 .04. 1.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<13 %	9,9 %	0 %	0 %	0%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.30 .04. 1.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	<13 %	0 %	0 %	0 %	0%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	12 Laporan	100%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.3 0.0 4.1. 02	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	12 Jenis	12 Jenis	100%
3.30 .04. 1.02 .01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	<15 %	9,9 %	0 %	0 %	0%	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.30 .04. 1.02 .02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	47 Kali	10 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	24 Laporan	100%
3.3 0.0 4.1. 03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	80 %	0 %	0 %	0 %	0%	<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	80 %	80 %	100%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30.04.1.03.01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	24 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0%	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5 Laporan	5 Laporan	100%
<b>3.30.05</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>8 %</b>	<b>53 %</b>	<b>16 %</b>	<b>62,5 %</b>	<b>391%</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>8 %</b>	<b>8 %</b>	<b>100%</b>
<b>3.30.5.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>196 Pelaku Usaha / UKM</b>	<b>60 Pelaku Usaha / UKM</b>	<b>100 Pelaku Usaha / UKM</b>	<b>90 Pelaku Usaha / UKM</b>	<b>90%</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>196 Pelaku Usaha</b>	<b>356 Pelaku Usaha</b>	<b>182%</b>
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang internasional, nasional dan lokal	99 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	10 Pelaku Usaha / UKM	8 Pelaku Usaha / UKM	80%		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	28 Pelaku Usaha	20%
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	30 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	0%		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	20%
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	24 Produk	4 Produk	0 Produk	0 Produk	0%		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	4 Produk	8 Produk	17%
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	540 Pelaku Usaha / UKM	60 Pelaku Usaha / UKM	90 Pelaku Usaha / UKM	82 Pelaku Usaha / UKM	91%		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha	262 Pelaku Usaha	22%
<b>3.30.06</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>200%</b>



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.3 0.0 6.1. 01	<b>Pelaksanaan perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</b>	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	2	Kabupaten/Kota	40%	<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/ kota</b>	0	Kabupaten/Kota	10	Kabupaten/Kota	200%
3.30 .06. 1.01 .01	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	127	Permasalahan	12	Permasalahan	24	Permasalahan	24	Permasalahan	100%	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	0	BPSK	0	BPSK	0%
3.30 .06. 1.01 .02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	71	Rakor	1	Rakor	0	Rakor	0	Rakor	0%	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	0	LPKSM	0	LPKSM	0%
3.3 0.0 6.1. 03	<b>Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/ atau jasa disuruh daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota</b>	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	100%	<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/ kota</b>	5	Kabupaten/Kota	5	Kabupaten/Kota	100%
3.30 .06. 1.03 .01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan /atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	25	Kegiatan	12	Kegiatan	10	Kegiatan	10	Kegiatan	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5	Laporan	27	Laporan	20%
3.3 0.0 7	<b>Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	90	%	0	%	80	%	80	%	100%	<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	80	%	80	%	89%
3.3 0.0 7.1. 03	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	90	%	0	%	80	%	80	%	100%	<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	80	%	160	%	178%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30 .07. 1.03 .01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	100	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder , Tokoh asyarakat atau Influencer	1	Lapor an	21	Laporan	1%
3.30 .07. 1.03 .02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	125	Peserta	40	Pesert a	0	Pesert a	0	Pesert a	0%	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	Lapor an	40	Laporan	0%
3.30 .07. 1.03 .03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan meyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	58	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%
<b>3.3 1.0 2</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>																
<b>3.3 1.0 2</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>33</b>	<b>%</b>	<b>33</b>	<b>%</b>	<b>33%</b>
<b>3.3 1.0 2.1. 01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>16</b>	<b>Kegiat an</b>	<b>3</b>	<b>Kegia tan</b>	<b>3</b>	<b>Kegia tan</b>	<b>3</b>	<b>Kegia tan</b>	<b>100%</b>	<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>3</b>	<b>Kegia tan</b>	<b>9</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>56%</b>
3.31 .02. 1.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	5	Kegiat an	1	Kegiat an	2	Kegiat an	2	Kegiat an	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Doku men	4	Kegiatan	20%
3.31 .02. 1.01 .04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan	2	Sarana	1	Saran a	1	Saran a	1	Saran a	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	1	Doku men	3	Sarana	50%



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	Sarana dan Prasarana Industri	termanfaatkan								Prasarana Industri			
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	12 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	6 Kegiatan	17%
3.31.02.1.01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah dokumen yang disampaikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>3.31.03</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>		<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	
<b>3.31.03.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>27 Perusahaan</b>	<b>17 Perusahaan</b>	<b>0 Perusahaan</b>	<b>0 Perusahaan</b>	<b>0%</b>		<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>0 Perusahaan</b>	<b>17 Perusahaan</b>	<b>63%</b>	
3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan yang diawasi	27 Perusahaan	31 Perusahaan	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0%		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	31 Perusahaan	0%	
<b>3.31.04</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>		<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

terlaksana																	
3.3 1.0 4.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1	Informasi	1	Informasi	0	Informasi	0	Informasi	0%	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1	Informasi	1	Informasi	100%
3.31 .04. 01.0 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	30	Perusahaan	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0%	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	25	Dokumen	25	Perusahaan	83%
3.31 .04. 01.0 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	25	Perusahaan	31	Perusahaan	0	Perusahaan	0	Perusahaan	0%	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	21	Dokumen	21	Perusahaan	84%



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai dengan tugas dan fungsi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maka tidak menerapkan SPM. Sehingga tabel 2.2 tidak dapat disajikan.



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

*Tabel 2.2*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan koperasi sehat	-	5%	5%	5%	18,3%	5%	5%	5%	Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara, Koperasi sehat adalah Koperasi Aktif, Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2022 terdapat 573 Koperasi Aktif dan hanya ada 111 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
2	Pertumbuhan UMKM naik kelas	-	3%	5%	5,5%	-	3%	5%	5,5%	Untuk capaian UKM naik kelas tidak terdata
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kaltara pada Tahun n	-	5,20 %	5,70 %	6,30 %	45,41%	5,20 %	5,70 %	6,30 %	Dikarenakan pandemic covid 19 pada tahun 2020 nilai ekspor barang mengalami penurunan karena hal itu penentuan target untuk pertumbuhan nilai ekspor tidak mengalami kenaikan signifikan dan proyeksi sama dengan target.
4	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	-	1%	1.8%	2%	11,11%	1%	1.8%	2%	Dikarenakan pandemic covid 19 pada tahun 2020 nilai ekspor barang mengalami kenaikan yang tidak signifikan karena hal itu penentuan target untuk laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB dan



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

										proyeksi sama.
5	Persentase kontribusi sektro industri terhadap PDRB	-	9,20 %	9,23 %	9,28 %	7,77%	9,20 %	9,23 %	9,28 %	Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 8,87% dan pada tahun 2022 sebesar 7,77 %, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 1,10% karena hal tersebut maka target dan proyeksi sama .
6	Persentase Koperasi Aktif	-	70%	71%	71,70 %	70,25%	70%	71%	71,70 %	Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2022 dari 813 Koperasi yang ada di Kalimantan Utara terdapat 573 Koperasi Aktif dan hanya ada 111 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
7	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	-	1.97 %	1.99 %	2%	11,95%	1.97 %	1.99 %	2%	Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Pada tahun 2022 dari 20.447 UMKM hanya 16.090 UMKM dibandingkan tahun lalu UMKM yang mengakses KUR mengalami peningkatan sebesar 11,95% karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
8	Pertumbuhan UMKM	-	5%	5%	6.5%	-42,23%	5%	5%	6.5%	Penurunan pertumbuhan UMKM pada tahun 2022 dikarenakan ada perbaikan terkait pendataan yang lebih mengutamakan UMKM bernib pada tahun 2022 UMKM yang



Rencana Kerja Tahun 2024  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

										memiliki NIB sebesar 20.447 UMKM sedangkan jumlah seluruh UMKM pada tahun 2021 sebesar 35.396 UMKM sementara yang memiliki NIB sebesar 6.-43 UMKM dan rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing. Sumber Daya Alam Lokal yang tersedia di Kalimantan Utara banyak belum dimanfaatkan untuk dijadikan produk unggulan daerah karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
9	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	-	1,80 %	2,10 %	2,30 %	57,70%	1,80 %	2,10 %	2,30 %	Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara. Pada tahun 2022 ada kenaikan neraca perdagangan sebesar 57,70%. Sehingga perlu menjaga stabilitas neraca perdagangan agar terus naik dan tidak mengalami penurunan. Salah satu program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
10	Persentase Inflasi Pangan Bergejolak	-	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	3,25%	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	Kenaikan konsumsi yang belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok bisa membuat harga pangan bergejolak, meski pasokan memadai, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menjaga inflasi pangan bergejolak dengan target dan proyeksi yang sama karena mengikuti target



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

										nasional karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
11	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	-	7%	6%	5%	6,7%	7%	6%	5%	Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
12	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	-	10%	15%	20%	24,12%	10%	15%	20%	Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
13	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	-	13.30 %	14.41 %	15.52 %	26%	13.30 %	14.41 %	15.52 %	Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 8,87% dan pada tahun 2022 sebesar 7,77 %, sehingga Persentase





### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan sebuah tantangan dan pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu

- 1) Rendahnya pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 8,87% dan pada tahun 2022 sebesar 7,77 %, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 1,11%.
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga



untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah.

- 3) Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara. Pada tahun 2021 ada kenaikan neraca perdagangan sebesar 65,94%. Sehingga perlu menjaga stabilitas neraca perdagangan agar terus naik dan tidak mengalami penurunan. Salah satu program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.
- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
- 5) Rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing. Sumber Daya Alam Lokal yang tersedia di Kalimantan Utara banyak belum dimanfaatkan untuk dijadikan produk unggulan daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Pada tahun 2022 dari 20.447 UMKM hanya 16.090 UMKM dibandingkan tahun lalu UMKM yang mengakses KUR mengalami peningkatan sebesar 11,95% karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
- 7) Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara, Koperasi sehat adalah Koperasi Aktif, Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2022 terdapat 573 Koperasi Aktif dan hanya ada 111 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, maka bisa



## **Rencana Kerja Tahun 2024**

### **Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan.



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

*Tabel 2.3*  
*Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024*  
*Provinsi Kalimantan Utara*

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.552.333.650	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.652.333.650	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					19.552.333.650	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				19.652.333.650	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	12.620.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	12.720.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	500.000.000	



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	400.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	50.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.430.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.430.000.000</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Bulungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	8.030.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	8.030.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.400.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.400.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>287.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>287.000.000</b>	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 stel	67.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 stel	67.000.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	220.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	220.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.669.000.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.669.000.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	23.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	23.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	145.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	145.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	12.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.200.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>0 Unit</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>0 Unit</b>	<b>-</b>	
14	Pengadaan Mebel		Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>137.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>137.000.000</b>	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Bulungan	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bulungan	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	110.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>697.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>697.000.000</b>	
19	Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kabupaten Bulungan		3 Unit	90.000.000	Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan		3 Unit	90.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	180.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	427.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	427.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>26,89 %</b>	<b>350.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>26,89 %</b>	<b>350.000.000</b>	
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>70 %</b>	<b>350.000.000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>70 %</b>	<b>350.000.000</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

21	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara)	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	33 Unit	350.000.000	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara)	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 Unit	350.000.000	Terdapat Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>61 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>61 %</b>	<b>600.000.000</b>	
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	<b>50 Peserta</b>	<b>600.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	<b>50 Peserta</b>	<b>600.000.000</b>	
22	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Kabupaten Bulungan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Koperasi	600.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bulungan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Koperasi	600.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Persentasi UMKM yang mengakses KUR	56,67 %	2.855.619.365	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Persentasi UMKM yang mengakses KUR	56,67 %	2.855.619.365	
	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	70 UMKM	2.855.619.365	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	58 UMKM	2.855.619.365	
23	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 Unit Usaha	2.855.619.365	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 Unit Usaha	2.855.619.365	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6,5 %	3.126.714.285	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6,5 %	3.126.714.285	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>			<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	<b>71 UMK</b>	<b>3.126.714.285</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	<b>71 UMK</b>	<b>3.126.714.285</b>	
24	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi. Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	600 Usaha	3.126.714.285	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi. Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	600 Unit Usaha	3.126.714.285	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>25.350.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>25.350.000.000</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>22.875.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>22.550.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>95 %</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>95 %</b>	<b>300.000.000</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>			<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>320 Form</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>3209 Form</b>	<b>300.000.000</b>	
25	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA		Tarakan dan Nunukan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	75 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	300.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>25 %</b>	<b>18.150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>25 %</b>	<b>18.150.000.000</b>	
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>			<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>18.150.000.000</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>		<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>18.150.000.000</b>	
26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	18.000.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 lokasi	18.000.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persaman satuan output dengan indikator sebelumnya



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

26	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	150.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>1.350.000.000</b>	
	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>600.000.000</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>600.000.000</b>	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	300.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	300.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>			<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	6 %	500.000.000	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	6 %	750.000.000	
30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	300.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	500.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
31	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	200.000.000	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	250.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah</b>			Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	0 %	-	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk</b>		Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	0 %	-	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

Kerjanya							Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						
32	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	0 Laporan	-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	0 Laporan	-	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>5 %</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>5 %</b>	<b>1.400.000.000</b>		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	196 Pelaku Usaha	1.475.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	54 Pelaku Usaha	1.400.000.000		
33	Pameran Dagang Internasional/ Nasional		Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha/UKM	700.000.000	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha/UKM	700.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

34	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku Usaha/UKM	150.000.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30	Pelaku Usaha/UKM	200.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya
35	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Kalimantan Utara	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	4	Produk	200.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	6	Produk	500.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya
36	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120	Pelaku Usaha/UKM	425.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	0	Pelaku Usaha/UKM	-	Sub Kegiatan dihapus sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023 dan anggaran digabungkan dengan sub kegiatan lainnya



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>1 %</b>	<b>800.000.000</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>1 %</b>	<b>600.000.000</b>		
	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>	
37	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2	BPSK	200.000.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	2	BPSK	150.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
38	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2	LPKSM	300.000.000	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	2	LPKSM	150.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

39	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	300.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	300.000.000	Terdapat Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>85 %</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>85 %</b>	<b>750.000.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>			<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	<b>85 %</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	<b>85 %</b>	<b>750.000.000</b>	
40	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder , Tokoh asyarakat atau Influencer	1 Laporan	350.000.000	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder , Tokoh asyarakat atau Influencer	1 Laporan	350.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
41	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	400.000.000	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	400.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

42	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Sistem Informasi	300.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0 Sistem Informasi	-	Sub Kegiatan dihapus sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023 dan anggaran digabungkan dengan sub kegiatan lainnya
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>2.475.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>2.800.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>33 %</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>33 %</b>	<b>2.000.000.000</b>	
	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>			<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2.000.000.000</b>	
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	300.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	700.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	700.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

45	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1.000.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
46	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889 dan masih terdapat persamaan satuan output dengan indikator sebelumnya
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>			<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>60 %</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>60 %</b>	<b>300.000.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>			<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>23 Perusahaan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>23 Perusahaan</b>	<b>300.000.000</b>	



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	Terdapat Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.1.15.5 Tahun 2023
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>475.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000.000</b>	
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>			<b>Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>1 Informasi</b>	<b>475.000.000</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		<b>Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>1 Informasi</b>	<b>500.000.000</b>	
48	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	27 Dokumen	175.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	27 Dokumen	200.000.000	Terdapat Perbedaan indikator dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
49	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan		5 Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	23 Dokumen	300.000.000	Pemantauan dan Evaluasi	5 Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	23 Dokumen	300.000.000	Terdapat Perbedaan indikator



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	aten / Kota	dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	n	00	Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	ten / Kota	dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		dikarenakan penyesuaian indikator dengan indikator yang terdapat pada Kepmendagri 050-5889
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>				<b>44.902.333.650</b>					<b>44.902.333.650</b>



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Vol	Catatan
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jl. Lingkar, Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMKM	Relokasi Pembangunan bagi pedagang di area pelabuhan Tunon Taka, diakomodir apabila memenuhi persyaratan
2	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Di Kabudaya, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMKM	Bantuan Modal UMKM Di Kabudaya, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
3	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan	Desa Pa'Delung Kec. Krayan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga	63 UMKM	Bantuan Mesin Jahit Bahan Kulit Kelompok



	Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Barat, Provinsi Kalimantan Utara, ,	dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan		UKM RUM RO GA'I Desa Pa Delung, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
4	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Pa'Pirit Kec. Krayan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan Mesin Pengolahan Selai Nanas Yang Memproduksi Dodol Nanas, dan Kerupuk Nanas Kelompok UKM Desa Pa'Pirit, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
5	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Liang Butan Kec. Krayan Induk, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan Mesin Pengolah Selai Nanas Kelompok UKM NASDU Unggul, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
6	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	Desa Pa Mering Kec. Krayan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	63 UMK M	Bantuan Mesin Pengolahan Selai Nanas Yang Memproduksi Dodol Nanas, dan Kerupuk Nanas Kelompok



	Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan		UKM Desa Pa Mering, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
7	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Liang Tugul, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan Mesin Pengolah Selai Nanas Kelompok UKM Desa Long Tugul, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
8	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Pa Urang Kec. Krayan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Permohonan Bantuan Mesin Gilingan Tebu Diesel (FUTAKE) , diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
9	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Long Pa'sia Kec. Krayan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Permohonan Bantuan Mesin Pengilingan Padi (RICE MILING UNIT) YANMAR TMM20, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
10	Menumbuhkembangkan UMKM untuk	Kecamatan Tanjung	Jumlah Unit Usaha UMKM	63 UMK	perlu adanya bantuan



	Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Palas, Provinsi Kalimantan Utara, ,	yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	M	Pengadaan UMKM agar Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, dikembalikan Perlu penjelasan lebih lanjut terkait bantuan pengadaan UMKM (jenis bantuan)
11	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan modal usaha utk 20 orang tukang jahit pakaian di tjt. Selor kabupaten Bulungan, 20 jt per orang, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	krayan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	63 UMK M	Mengusulkan Pembangunan Pasar di Setiap Kecamatan yang ada di Krayan, tidak diakomodir Tidak sesuai wewenang, jika pembangunan jenis pasar rakyat/tradisional bukan kewenangan provinsi, karena kewenangan provinsi merupakan pembangunan pusat distribusi,



13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Kayan Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Kayan Hulu, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Kayan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Kayan Selatan, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Sungai Boh, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Sungai Boh, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Kayan Hilir (Long Sule), Provinsi Kalimantan Utara	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Kayan Hilir (Long Sule) , diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional	Kec. Pujungan, Provinsi	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk



	dan Pusat Distribusi Provinsi	Kalimantan Utara, ,	Pusat Distribusi Provinsi		penerbangan di Kec. Pujungan, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Bahau Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Bahau Hulu, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Sungai Tubu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Sungai Tubu, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Mentarang Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Subsidi ongkos angkut barang untuk penerbangan di Kec. Mentarang Hulu, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
21	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan	Kec. Tanjung Palas, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan	63 UMK M	Pemberian bantuan penjahit DD Titilas, diakomodir selama anggaran



	Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		tersedia dan persyaratan terpenuhi
22	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	jl perdana kel tanjung palas Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan kelompok Umkm kedai kopi VIDARIVAYA, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
23	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	JL Cempedak Kel Tanjung selor Hilir Kec Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan Mesin Kopi UMKM AKAILA, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
24	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	KAB.MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	PENINGKATAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN MALINAU, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
25	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang	jl Ahmad yani no 91a RT	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan	63 UMK M	Bantuan Umkm AKAILA BOSS,



	Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	003 Tidung Pale KTT, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan		diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
26	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	jl cempedak kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan umm kelompok Akaila Steel, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
27	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Desa Bumi Rahayu Kec Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	bantuan UMKM Desa Bumi Rahayu, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
28	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	JL Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan	63 UMK M	Bantuan UMKM D&S KIOS, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi



	Kemiskinan		Kemiskinan		
29	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	kec Tanjung Selor , Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan	63 UMK M	Bantuan Kelompok UMKM NIAGA tanjung Selor, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
30	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, Kec. Sebuku, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Seimanggaris dan Kec. Sembakung, Provinsi Kalimantan Utara,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pengadaan alat kelengkapan usaha dan bantuan modal, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
31	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Sekota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1 Laporan	Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi
32	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	Tanah tidung, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	63 UMK M	Bantuan modal usaha UMKM kuliner di tana Tidung, diakomodir selama anggaran tersedia dan persyaratan terpenuhi



	Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
33	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Tarakan	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan teknologi	480 Unit Usaha	Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian, Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
34	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Tarakan	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro, Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
35	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Tana Tidung	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pembinaan Dan Peningkatan Keterampilan Ekonomi Kreatif Seperti Pengolahan Bambu Menjadi Produk Kerajinan Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
36	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 Dokumen	Pembinaan Dan Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Dan Usaha Simpan Pinjam Bagi Usaha Mikro Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi



					Persyaratan
37	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Tana Tidung	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Rumput Laut untuk 5 Kelompok UMKM Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
38	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Nunukan	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Rumput Laut untuk 5 Kelompok UMKM Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
39	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 Dokumen	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Di Kecamatan Nunukan Dan Kecamatan Sebatik Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
40	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bulungan	UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	480 Unit Usaha	Pembangunan Rumah Kemasan (Umkm) Tanjung Selor, Usulan dikembalikan untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut



41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	Pelatihan Membatik Dan Pengajuan Haki, diakomodir menggunakan anggaran pusat (APBN)
42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	Pengadaan Mesin Olahan Rotan Di Sembakung, Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	Pengadaan Unit Pengelolaan Hasil Budidaya Kopi Krayan, Diakomodir Bila Anggaran Tersedia Dan Memenuhi Persyaratan
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kec. Bahau Hulu, Provinsi Kalimantan Utara, ,	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 unit	Pembangunan Pasar Induk Bunyu, Usulan dikembalikan untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

**3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dukungan terhadap prioritas nasional berdasarkan hasil rakortekrenbang disajikan pada table 3.1 sebagai berikut :

*Tabel 3.1  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
yang mendukung Prioritas Nasional*

<b>No</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Program yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Nama Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Lokasi kegiatan</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan
	Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Luar Kaltara	
Peningkatan Citra Produk Ekspor			Kalimantan Utara	
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga	5 Kabupaten / Kota
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	5 Kabupaten / Kota



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

			Kepentingan	Kemiskinan	
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga	5 Kabupaten / Kota
<b>JUMLAH</b>		<b>11 Program</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>16 Sub Kegiatan</b>	

**3.1.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi**

Telaahan terhadap prioritas provinsi dilakukan terhadap:

- a. Sepuluh prioritas daerah tahun 2024 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah pemangku Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Hasil penelaahan terhadap prioritas daerah dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

*Tabel 3.2*  
*Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024*  
*Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah*

No	Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi kegiatan
2	Mewujudkan pembangunan KIPI	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung	5 Kabupaten / Kota



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

		Provinsi	Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Kabupaten Bulungan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota



3	Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembinaan dan Pengendalian Pisat Distribusi dan Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Tarakan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	5 Kabupaten / Kota
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	



4	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan
6	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5 Kabupaten / Kota



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

	Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan
	Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Luar Kaltara
Pameran Dagang Internasional/ Nasional			Kalimantan Utara	
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Luar Kaltara	
Peningkatan Citra Produk Ekspor			Kalimantan Utara	
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	
		Fasilitasi Peningkatan	5 Kabupaten	



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

				Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	en / Kota
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kalimantan Utara
8	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
		Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	5 Kabupaten /



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Kalimantan Utara
				Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kalimantan Utara
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	5 Kabupaten / Kota
9	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
<b>JUMLAH</b>		<b>12 Program</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>24 Sub Kegiatan</b>	



### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan rencana strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut ;

Tujuan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan melaksanakan Program Kegiatan yang bisa meningkatkan pertumbuhan PDRB di sektor industri. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri program ini mendukung pembangunan KIPI yang ada pada prioritas daerah yang ditetapkan oleh Gubernur. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini mendukung sistem nasional untuk menertibkan perizinan industri dan data industri di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan melaksanakan 4 Program yaitu Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar agar sesuai perundang-undangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan jual beli dan dalam menyediakan barang pokok penting yang di seluruh wilayah termasuk daerah perbatasan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting untuk menjaga stabilisasi barang pokok penting di Kalimantan Utara dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri berupa sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.
3. Meningkatkan Neraca Perdagangan Ekspor Kalimantan Utara. Dengan melaksanakan 2 Program yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan untuk membantu perizinan para pelaku ekspor agar mudah mendapatkan SKA, Program Pengembangan Ekspor untuk meningkatkan produk unggulan yang berdaya saing ekspor dan melakukan pembinaan para pelaku ekspor.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM. pengembangan produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui peningkatan daya saing produk UKM. Hal tersebut dilaksanakan



melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi UKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia UKM dan untuk menunjang tujuan tersebut didukung oleh 3 Program yaitu Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dan Program Pengembangan Umkm.

Adapun sasaran utama yang harus dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu, terdiri atas :

1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat
2. Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR
3. Meningkatnya Pertumbuhan UMKM
4. Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara
5. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah
6. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk
7. Meningkatnya Pasar Produk Lokal
8. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri



**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2024 beserta prakiraan maju 2024 disajikan dalam tabel berikut:



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

*Tabel 4.1*

*Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Keterangan				Ca ta n /R ek o m e n d a s i	Urut as Prio ritas Sub Kegi atan							
		Capaian Program	Hasil Kegiat an	Keluara n Sub Kegiata n (sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmenda gri 050- 5889 Thn 2021)	Lokasi Ouput Kegiata n	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sum ber Dan a	Target Capaian Kinerja		Pagu Indi katif	Prio ritas Nasi onal (PN)			Prio ritas Daer ah	SP M	12 Fokus Pemba nguna n Daera h				
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri 050- 5889 Thn 2021)				Target Capaian Kinerja	Satua n								Target Capaian Kinerja	Satua n	Target Ukur	Target
							Target Capaian Kinerja	Satua n	Target Capaian Kinerja	Satua n	Target Capaian Kinerja	Satua n	Target Capaian Kinerja	Satua n															
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14		15	16				17	18				
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																												
2,17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																												
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyele nggaha Pemerintah Daerah					100	%										Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyele nggaha Pemerintah Daerah	100%										
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang							17	Dokumen								Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen										



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

			disusun																							
2.17.01.1.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bulungan				2	Dokumen	2	Dokumen	400.000.000	APB D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kabupaten Bulungan				13	Dokumen	13	Laporan	50.000.000	APB D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bulungan				17	Dokumen	2	Laporan	50.000.000	APB D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakannya					12	Bulan							Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan	12 Bulan								
2.17.01.1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan			12	Bulan	48	Orang / Bulan	8.030.000.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	8.040.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan			12	Bulan	1218	Dokumen	1.400.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12	Bulan						Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan									



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17.01.1.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Bulungan				80	stel	80	Paket	67.000.000	APBD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0 stel	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bulungan				15	Orang	15	Orang	220.000.000	APBD	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13 Orang	180.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>						<b>12</b>	<b>Bulan</b>						<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>							
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				13	Unit	4	Paket	64.000.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000	-	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				12	Bulan	1	Paket	23.000.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				12	Bulan	5	Paket	225.000.000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				12	Bulan	9	Paket	145.000.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	145.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				2160	Eksemplar	2500	Dokumen	12.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2500 Dokumen	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara				140	Kali	140	Laporan	1.200.000,00	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>					<b>3</b>	<b>Unit</b>							<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>								
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang disediakan	Kabupaten Bulungan			0	Unit	0	Unit	-	APB D	Jumlah Mebel yang disediakan	23 Unit	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.09.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan			3	Unit	3	Unit	90.000.000	APB D	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.17.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>						<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>									
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan			1640	Pcs	2	Laporan	12.000.000	APB D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				12	Bulan	6	Laporan	110.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	110.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				12	Bulan	2	Laporan	15.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan					12	Bulan						Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan	12 Bulan							



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Kabupaten Bulungan				15	Unit	15	Unit	180.000.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	180.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bulungan				4	Ruangan	5	Unit	427.000.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	427.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.03	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>							<b>26,89</b>	<b>%</b>					<b>Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>31,52</b>							
2.17.03.1.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang tertib administrasi</b>							<b>70</b>	<b>%</b>					<b>Persentase koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>74</b>							





**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat					75	Peserta						Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	75 Orang									
2.17.03.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah pengurus, Pengawas dan Anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				75	Koperasi	75	Orang	600.000.000	APBD	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	600.000.000	-	Prioritas Daerah No. 6	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 2	Merupakan kegiatan pelatihan bagi pembinaan, pengurus dan anggota koperasi dalam rangka peningkatan koperasi sehat di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 6		





**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM					6,5	%								Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	93									
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Menengah		Jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah						71	Pelaku Usaha						Jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	93 Pelaku Usaha									
2.17.08.1.01.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan /pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					600	UMKM	600	Unit Usaha	3.126.714.285	APB D	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	720 Unit Usaha	3.752.057.142	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8		Fokus Pembanguan Daerah Tahun 2024 No. 2	Merupakan kegiatan pelatihan untuk UKM	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 3		



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																									
3.30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																									
3.30	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun					95	%										kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	97%							
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun						3209	form								Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/ Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	3530 Form							
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA			Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					80	Pelaku Usaha /UMKM	2	Dokumen	300.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	85 Dokumen	325.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 1	Merupakan kegiatan dalam peningkatan ekspor di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 29



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun</b>					25	%								<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun</b>	25%								
3.30.03.1.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas</b>		<b>Jumlah pembangunan dan pusat distribusi regional dan Provinsi yang dikelola</b>						1	<b>Lokasi</b>						<b>Jumlah pembangunan dan pusat distribusi regional dan Provinsi yang dikelola</b>	1	<b>Lokasi</b>							
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan					17	Lokasi	1	Unit	18.000.000.000	APB D	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	9.000.000.000	-	Prioritas Daerah No. 4	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menjaga inflasi di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 7	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan					1	Kegiatan	1	Laporan	150.000.000	APB D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	-	-	Prioritas Daerah No. 4	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menjaga inflasi di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 16	





## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Koefisien Variasi HargaBarangKebutuhan PokokAntar Waktu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				13	%	12	Laporan	300.000.000	APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	300.000.000	-	Prioritas Daerah No. 3	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menjaga inflasi di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 21
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten / kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah						6	%					Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6%							



## Rencana Kerja Tahun 2024

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota			Koefisien Variasi HargaBarang Kebutuhan PokokAntar Wilayah	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan			15	%	12	Laporan	500.000.000	APB D	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota	12 Laporan	300.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 3	-	Fokus Pembanguan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 19
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah operasi pasar yang dilaksanak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan			10	Kali	2	Laporan	250.000.000	APB D	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	200.000.000	-	Prioritas Daerah No. 3	-	Fokus Pembanguan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 8





**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30 .05. 1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi					63	Pelaku Usaha							Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi	196 Pelaku Usaha								
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan			20	Pelaku Usaha / UMKM	27	Pelaku Usaha	700.000.000	APB D	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	27 Pelaku Usaha /UKM	750.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 4	Perencanaan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 24			



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.30.05.1.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				4	Pelaku Usaha / UMKM	30	Pelaku Usaha	200.000.000	APB D	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha /UKM	250.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8		Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 4	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 22
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor			jumlah produk yang ditingkatkan citranya	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				4	Produk	6	Produk	500.000.000	APB D	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	4 produk	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8		Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 4	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 23
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				120	Pelaku Usaha /UMKM	0	Pelaku Usaha /UMKM	-	APB D	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha /UKM	425.000.000						



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar					1	%								Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1%									
3.30.06.1.01	Pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten/kota						5	Kabupaten/Kota						Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten/kota	5	Kabupaten/Kota								
3.30.06.1.01.1	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan Konsumen		Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					24	Permasalahan	2	BPSK	100.000.000	APB D	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2	BPSK	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 14	



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen		Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				15	Rakor	2	LPKSM	100.000.000	APB D	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	300.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 15
3.30.06.1.03	Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa disuruh daerah kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota					5	Kabupaten/Kota						Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/Kota							
3.30.06.1.03.01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga		Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				9	Kegiatan	5	Laporan	300.000.000	APB D	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	300.000.000	Prioritas Nasional No. 3	-	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 13





## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.30.07.1.03.02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				250	Peserta	1	Laporan	400.000.000	APBD	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	400.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas No. 6	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 8	Merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan produk dalam negeri	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 10
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				1	Sistem Informasi	0	Dokumen	-	APBD	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan meyampai data informasi perdagangan antar pulau	10 Pelaku Usaha	300.000.000	-					
3.31.02	Urusan Perindustrian																						



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana					50	%									Persentase Perencanaan pembangunan industri yang terlaksana	67%									
3.31.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3	Kegiatan							jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Kegiatan									
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah Industri		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				0	Kegiatan	1	Dokumen	300.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah Industri	0 Dokumen	-	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 11	Merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan KUPI	Urutan Prioritas subkegiatan No. 1				



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	Sarana	1	Dokumen	700.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	700.000.000	Prioritas Daerah No. 2 dan No.8	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 11	Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri di Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 2	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	Kegiatan	2	Dokumen	1.000.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1.000.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6		Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 1	Merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan produk industri Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 17



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.31.02.1.01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen yang disampaikan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				0	Dokumen	0	Dokumen	-	APBD	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 11	Merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan KIP	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 18
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>							<b>60</b>	<b>%</b>					<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>80%</b>							
3.31.03.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>					<b>23</b>	<b>Perusahaan</b>						<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>25 Perusahaan</b>							



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi		Jumlah perusahaan yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalamLingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara				23	Perusahaan	1	Dokumen	300.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalamLingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2024 No. 11	Merupakan kegiatan pengembangan perusahaan industri di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 25
3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>							<b>60</b>	<b>%</b>					<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100%</b>							



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.31.04.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau					1	Informasi						Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 Informasi								
3.31.04.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		Jumlah industri berizin yang terpublikasikan di SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Provinsi Kalimantan Utara					27	Perusahaan	27	Dokumen	200.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30 Dokumen	200.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembanguna Daerah Tahun 2024 No. 11	Merupakan kegiatan pengembangan perusahaan industri di Kaltara	Urutan Prioritas subkegiatan No. 26



## Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

3.31. C4.0 1.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data keSIINas	Provinsi Kalimantan Utara				23	Perusahaan	23	Dokumen	300.000.000	APB D	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data keSIINas	24 Dokumen	300.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembinaan Daerah Tahun 2024 No. 11	Merupakan kegiatan pengawasan perusahaan industri di Kaltara	Urutan Prioritas sub kegiatan No. 27
-----------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--	--	----	------------	----	---------	-------------	-------	---	------------	-------------	---	------------------------	---	--	--	--------------------------------------



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara diharapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- Perangkat Daerah) Tahun 2024. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Kalimantan Utara. Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :



**Rencana Kerja Tahun 2024**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan tersusunnya renja Dinas Perindustrian, Peragangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD, RPJMD yang sekaligus akan mendukung perwujudan visi kepala daerah priode 2021-2026 ; **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”** dan tema RKPD tahun 2024 **“Meningkatkan Keanekaragaman Industri Dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”**. Serta misi ke 6 dan 10 dari Gubernur Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 23 Januari 2023  
Kepala Dinas

Hj. Hasriyani, SH., MM  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP. 19730717 200312 2 008